

RINGKASAN

Marsha Maghfirah Tolla, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2016, ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 877K/PID.SUS/2014), Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum.

Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014 majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan subsidair, yang kemudian oleh majelis hakim Mahkamah Agung dinyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagaimana didakwakan pada Pasal 53 huruf c Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan tersebut, menurut penulis terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, serta putusan tersebut tidak sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, perlu adanya kesesuaian antara nilai-nilai keadilan bagi pelaku, dengan masyarakat sebagai korban dalam tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deksriptif analitis dan kemudian diinterpretasi untuk mengaitkan makna dari setiap bahan hukum kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap bahan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode tersebut, diketahui bahwa putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 kurang mencerminkan nilai keadilan bagi diri pelaku yang didasarkan pada asas kepastian hukum, teori pertanggungjawaban korporasi, maupun teori keadilan distributif. Selain itu, putusan tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan utilitarisme bagi masyarakat sebagai korban. Sedangkan solusi agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat tercapai adalah dengan menggunakan keadilan restoratif.

SUMMARY

Marsha Maghfirah Tolla, Criminal Law, Law Faculty Of Brawijaya University, April 2016, ANALYSIS OF VERDICT ON THE CRIME HOARDING OF FUEL SUBSIDIES (SUPREME COURT RULING STUDY NUMBER 877K/PID.SUS/2014), Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum, Dr. Nurini Apriliana, SH., M.Hum.

Background of the theme selection is on Supreme Court Ruling Number 877K/Pid.Sus/2014 , the supreme court judges canceling verdict of Bekasi's district court who acquitted the defendant of primary indictment, and releasing defendant from all legal charges of subsidiary indictment, then the judge of supreme court stated that the defendant was guilty committed a crime hoarding of fuel subsidies as charges in Article Number 53, point C, Act Number 22, 2001 about Oil and Gas. In this decisions, the author argue about there are some things that still need to do further analysis between the vagueness about defendant's position as the person who have responsible for criminal acts that occur in his corporate environment, and the decision that does not comply with some provisions in the Criminal Law Procedural Code (KUHAP) so it does not reflect on the principle of legal security. Furthermore, it needed existence of suitability between the values of justice for perpetrator, and also for society as a victim in the crime hoarding of fuel subsidies.

Method of this writing using juridical-normative research with act (statute approach) and case approach, primary and secondary data sources which is obtained will be analyzed using descriptive-analytical method and then interpreted to connect the meaning of any legal materials then linked it to each other to find the connections from it. By using the methods, it is known that Supreme Court ruling Number 877K/Pid.Sus/2014, lack about value of justice for perpetrator itself who based on the principle of legal security, theory about corporate responsibility, and theory about distributive justice as well. Moreover, the decision was accordance with the value of utilitarianism justice for society as victim. While a justice solutions to both sides (parties) can be achieved by using restorative justice method.